

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang terdiri dari beberapa tempat hunian. Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu (Turner, 1972). Menurut Sumaatmaja (1988) pemukiman itu merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Dari lima kebutuhan hidup manusia, yaitu pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, atau dapat dikatakan juga peningkatan permukiman berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas hidup.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Penataan perumahan dan permukiman haruslah berlandaskan azas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup.



Dalam hal pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman, masyarakat berperan sebagai pelaku utama, sementara pemerintah mempunyai kewajiban sebagai pihak yang bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif demi tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

Permintaan akan jumlah hunian sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada saat sekarang ini bertambah dengan sangat pesat, hal ini menimbulkan masalah baru pada kawasan permukiman, yaitu semakin berkembangnya kawasan hunian yang kumuh dan semrawut. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Salah satu faktor yang mencirikan permukiman yang kumuh adalah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya akses, sanitasi yang tidak layak, air bersih yang belum memadai serta minimnya fasilitas umum dan sosial. Kawasan hunian yang kumuh dan semrawut sering kali dikaitkan dengan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan masih merupakan masalah yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah Indonesia. Secara umum kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1998 hingga sekarang mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diperoleh data pada tahun 2011 jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 12,49 persen atau 30.01 juta jiwa dengan pusat jumlah masyarakat miskin terpusat di pulau Jawa, dan pada bulan Maret tahun 2015, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,22 persen atau 28,59 juta jiwa. Dari data ini secara general dapat dilihat bahwa dari tahun 1998 hingga sekarang angka persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah

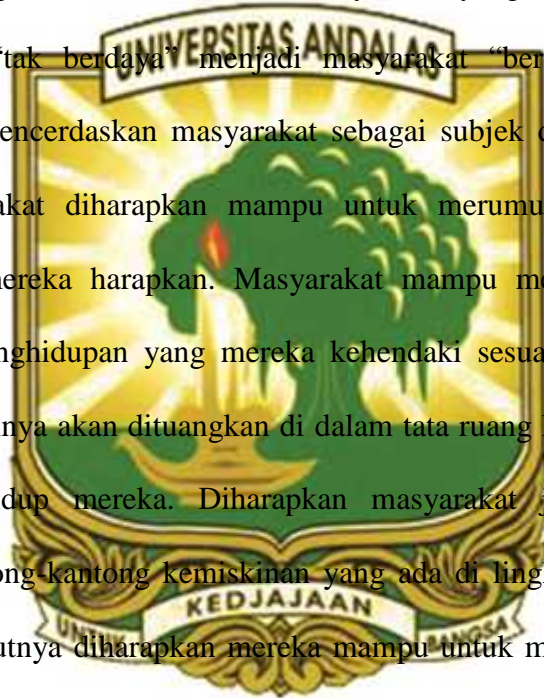


mengalami penurunan, namun masih belum mencapai target dari Sasaran Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang dicanangkan pemerintah untuk akhir tahun 2014 dan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. Dimana target pada RPJMN ini mengacu pada rumusan *Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu tanpa kemiskinan, terpenuhinya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Hal ini diimplementasikan di dalam RPJMN tahun 2015-2019 bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan target 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak.

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar dalam permasalahan permukiman. Hal ini dapat kita lihat banyaknya program-program pro-rakyat untuk menanggulangi kemiskinan melalui program perumahan swadaya, bantuan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di kawasan permukiman kumuh, dll. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membuat semua pihak secara bersama dan terkoordinasi membuat berbagai jenis kegiatan pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat. Kegiatan ini harus didukung oleh para relawan dan semua pihak di masyarakat.

Salah satu program pemerintah yang mendukung upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, yang diwujudkan secara

menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian), pembangunan sosial, dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia adalah program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, yang selanjutnya disebut PLPBK, di tingkat kelurahan yang dalam kegiatannya dilakukan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan *reward* yang berbentuk intervensi tahap akhir dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) untuk daerah-daerah yang telah memiliki masyarakat yang telah bertransformasi dari masyarakat “tak berdaya” menjadi masyarakat “berdaya”. Program ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat sebagai subjek dalam Pembangunan Nasional. Masyarakat diharapkan mampu untuk merumuskan visi dan misi kelurahan yang mereka harapkan. Masyarakat mampu merencanakan tatanan kehidupan dan penghidupan yang mereka kehendaki sesuai dengan kebutuhan mereka, yang nantinya akan dituangkan di dalam tata ruang kelurahan yang akan menjadi ruang hidup mereka. Diharapkan masyarakat juga mampu untuk menganalisis kantong-kantong kemiskinan yang ada di lingkungan permukiman mereka dan selanjutnya diharapkan mereka mampu untuk membantu menangani kantong-kantong kemiskinan tersebut dengan menggerakkan masyarakatnya kearah kegiatan ekonomi produktif. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana di kawasan tersebut sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut. Namun dikarenakan keterbatasan dana yang dikucurkan,



program ini dapat dilaksanakan hanya untuk beberapa titik yang selanjutnya disebut sebagai kawasan prioritas.

Pada tahun 2012, kota Bukittinggi terpilih sebagai lokasi penerima program PLPBK. Masing-masing kelurahan terpilih, memperoleh dana sebesar satu milyar rupiah yang digunakan untuk peningkatan kualitas infrastruktur permukiman. Program ini dilaksanakan dalam tiga tahun anggaran. Pada tahun 2014 program PLPBK di kota Bukittinggi telah selesai dilaksanakan. Pemerintah kota Bukittinggi sangat mengapresiasi kegiatan ini, hal ini dilihat dari keinginan pemerintah kota untuk mereplikasi program PLPBK ini yang dananya berasal dari APBD. Namun hingga saat sekarang masih belum ada kajian tentang evaluasi dari program PLPBK yang telah dilaksanakan. Dan juga apabila pemerintah kota Bukittinggi merasa bahwa program PLPBK ini memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, maka perlu dilakukan analisis untuk menghasilkan strategi pengembangan program ini. Dari keadaan inilah penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai strategi pengembangan dari program ini.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mengambil judul "*Strategi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kota Bukittinggi*".

1.2 Perumusan Masalah

Program kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di kota Bukittinggi telah selesai dilaksanakan di dua kelurahan terpilih yaitu kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Koto Selayan. Dari output program yang dihasilkan pemerintah kota Bukittinggi mengapresiasi kegiatan ini

dengan berencana akan melakukan replikasi program dengan pendanaannya melalui APBD.

Namun sampai saat sekarang belum ada dilakukan kajian tentang evaluasi kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ini. Apakah program ini mempunyai dampak yang signifikan bagi masyarakat, dan bagaimana strategi pengembangannya.

Idealnya untuk mereplikasi kegiatan ini harus dilakukan kajian evaluasi dan penyusunan strategi pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. Karena dalam pelaksanaannya akan mengalami perbedaan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan pendanaan APBN dan dengan pendanaan APBD. Kajian mengenai strategi pengembangan program bisa menjadi dasar pertimbangan dan masukan dalam pembuatan regulasi sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan sudah terencana dan terprogram dengan matang.

Dari kenyataan diatas, kajian tentang Strategi pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kota Bukittinggi sangat diperlukan.

Dari permasalahan diatas, yang menjadi pertanyaan penelitian (*Research Questions*) yang ingin diungkap pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kota Bukittinggi pada kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Koto Selayan.
2. Bagaimana dampak dari program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) bagi masyarakat kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Koto Selayan.

3. Bagaimana strategi pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di kota Bukittinggi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program PLPBK Kota Bukittinggi pada kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Koto Selayan.
2. Analisis dampak sosial ekonomi dari program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) bagi masyarakat kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Koto Selayan.
3. Menghasilkan strategi untuk pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

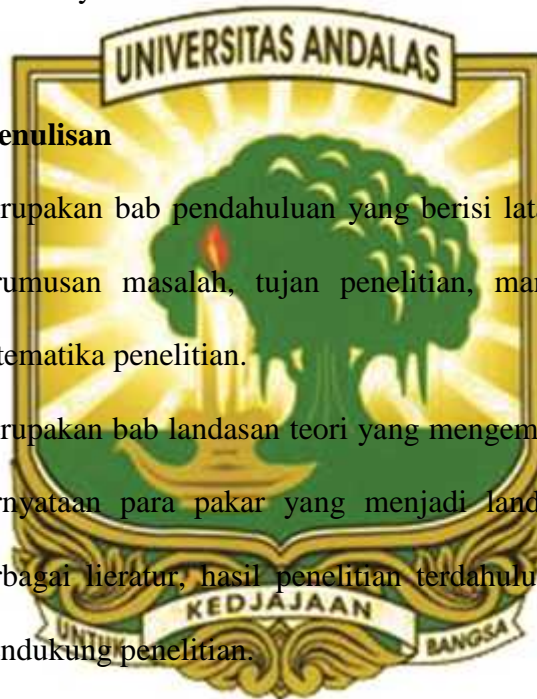
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai :

1. Sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah daerah kota Bukittinggi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pengembangan kawasan permukiman.
2. Bahan referensi dalam bentuk data dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk pihak yang berkompeten dalam kasus yang sama.
3. Bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang pengembangan kawasan permukiman.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Penelitian dilakukan di kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Koto Selayan Kota Bukittinggi
2. Evaluasi program dilakukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, proses pemasaran.
3. Analisis dampak dari program dilakukan untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.



1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I** : merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** : merupakan bab landasan teori yang mengemukakan pendapat dan pernyataan para pakar yang menjadi landasan penelitian dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu dan informasi yang mendukung penelitian.
- BAB III** : merupakan bab metodologi penelitian, memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta definisi operasional variable yang diuji.
- BAB IV** : merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian, berisi uraian atau gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang bersumber dari data yang bersifat umum. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang

bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V : merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan, menerangkan dan membahas tentang hasil analisa data yang diperoleh. Dalam bab ini juga dibahas strategi pengembangan program dalam perencanaan pembangunan. Berisi tentang hasil analisis yang memuat strategi, program serta dilanjutkan dengan kegiatan yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah terkait.

BAB VI : merupakan bab kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisa yang dilakukan dalam penelitian ini.

